

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah, terutama di sektor pertambangan. Sektor pertambangan menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar negara melalui penerimaan royalti, pajak dan deviden, selain itu pertambangan juga menjadi ladang untuk pembukaan lapangan pekerjaan. Di samping dampak positif tersebut, pertambangan juga mempunyai dampak buruk, terutama pada lingkungan, karena hampir setiap kegiatan pertambangan cenderung merusak lingkungan bahkan ada adagium yang menyatakan “tidak ada kegiatan pertambangan yang tidak merusak lingkungan”.

Di Indonesia kegiatan pertambangan di golongan menjadi 3 bagian yaitu golongan A (strategis) golongan B (vital) dan Golongan C (non strategis dan non vital), tetapi setelah keluarnya UU No 4 tahun 2009 bahan tambang digolongkan menjadi Mineral dan Batubara (Minerba) dan Minyak dan Gas Bumi (Migas).¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal tersebut, seseorang atau badan hukum dilarang untuk mengelola SDA, misalnya

¹ H.Salim HS,2012,Hukum Pertambangan Di Indonesia,RajaGrafindo Persada,Jakarta,hlm.44

pertambangan Minerba, kecuali dengan izin atau kontrak karya, namun pada prakteknya masih banyak pelanggaran yang terjadi, yaitu antara lain adanya pertambangan tanpa izin.

Pengelolaan pertambangan Minerba dapat dilakukan oleh pemerintah (BUMN atau BUMD), pihak swasta (domestik ataupun patungan) serta masyarakat yang telah memenuhi ketentuan syarat dan prosedur. Dalam hal ini, pertambangan rakyat berbeda dengan pertambangan ilegal, karena istilah pertambangan rakyat menunjuk pada pertambangan oleh rakyat yang dilakukan berdasarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Banyak daerah di Indonesia mempunyai potensi pertambangan yang sangat baik, salah satunya adalah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang juga sering disebut Sampit. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.496 km² dan berpenduduk sebanyak 373.842 jiwa pada tahun 2010. Wilayah geografis Kabupaten Kotawaringin Timur terletak di antara 112°4'3" - 113°16'11" BT dan 1°11'35" - 3°18'8" LS dengan luas seluruhnya 16.496 km², dan Kabupaten ini terdiri dari 13 kecamatan, 132 desa dan 12 kelurahan.

Kegiatan pertambangan rakyat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat Kotim dengan melakukan kegiatan pertambangan kecil di lingkungan sekitar aliran sungai Mentaya maupun di tengah hutan. Pelaku kegiatan pertambangan tersebut adalah masyarakat Kotim, dan hampir semua kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki IPR. Kegiatan pertambangan tersebut banyak dikeluhkan masyarakat lain yang bukan penambang, karena menimbulkan

dampak negatif terhadap lingkungan, juga ada keluhan soal kesehatan, seperti munculnya penyakit diare yang diakibatkan oleh air Sungai Mentaya yang tercemar karena kegiatan pertambangan atau terjadinya wabah penyakit gatal-gatal yang diderita masyarakat sekitar aliran air Sungai Mentaya yang di gunakan untuk mencuci pakaian, mandi dan sebagainya, sehingga kemungkinan tertular penyakit dari pencemaran lingkungan sangat mudah terjadi. Kegiatan pertambangan tersebut juga berdampak terjadinya tanah longsor di Kecamatan Cempaga, sehingga mengakibatkan munculnya reaksi keras berupa penolakan dari masyarakat sekitar yang tidak melakukan penambangan.

Di samping itu, kegiatan pertambangan tersebut juga dilakukan di luar Wilayah Pertambangan Rakyat, sehingga melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), bahkan ada yang dilakukan di kawasan perkebunan ataupun kawasan permukiman.

Sebagian kegiatan pertambangan tersebut dilakukan oleh pemilik modal atau pengusaha yang mempekerjakan masyarakat sekitar untuk melakukan penambangan, hanya saja, terhadap praktek kegiatan tersebut belum ada tindakan tegas dari pemerintah setempat untuk mengatasi permasalahan atau sepertinya terjadi pembiaran terhadap kegiatan pertambangan ilegal tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, salah satu persoalan hukum yang penting untuk diteliti adalah penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian persoalan Lingkungan di kabupaten Kotawaringin Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian persoalan Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Apakah ada kendala atau hambatan di dalam penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian persoalan Lingkungan di kabupaten Kotawaringin Timur.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian persoalan lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan di dalam penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian persoalan lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian persoalan Lingkungan di kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :
 - 1) Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka penerbitan izin pertambangan bagi pemohon dan mempertegas prosedur dan syarat yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh pemohon guna menghindari terjadinya pertambangan ilegal.
 - 2) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap dampak pengrusakan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan emas ilegal.
 - 3) Para pelaku kegiatan pertambangan terkait dampak negatif pertambangan ilegal terhadap lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa tulisan yang mirip dengan judul penelitian penulis, yaitu:

1. Manda Serevina Fransisca Putri Hutagaol Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2014 dengan judul “Peran Kantor Pelayanan

Perizinan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pertambangan Rakyat Di Kabupaten Sleman”.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana peran kantor pelayanan Perizinan dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan rakyat di Kabupaten Sleman.
- 2) Apakah ada yang menjadi hambatan atau kendala dari kantor pelayanan perizinan dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan rakyat di Kabupaten Sleman.

b. Tujuan Penelitian :

- 1) untuk mengetahui peran kantor pelayanan perizinn dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan rakyat di kabupaten Sleman.
- 2) Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi hambatan atau kendala dari kantor Pelayanan Perizinan dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan rakyatdi Kabupaten Sleman.

c. Kesimpulan :

1. Kantor Pelayanan Perizinan tidak lagi berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan rakyat di kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan kegiatan pertambangan rakyat telah dihentikan pasca Erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Kegiatan pertambangan rakyat kemudian dilakukan melalui normalisasi Daerah Aliran Sungai dilakukan oleh kantor Lingkungan Hidup dan Dinas SumberDaya Air Energi dan Mineral.

2. Dalam Kegiatan Normalisasi Daerah Aliran Sungai pengawasan dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral. Pengawasan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut menghadapi kendala, sehingga tidak dapat dilakukan secara optimal. Dalam melakukan pengawasan Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral dan Kantor Lingkungan Hidup terkendala pada jumlah personil dan dana yang kurang memadai.

2. Delvine Valentine Imkotta Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2013 dengan judul : “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Pasir Pantai Di Kabupaten Merauke”.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke.
- 2) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke.

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke.

2) Untuk mengetahui apakah ada kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke.

c. Kesimpulan : berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir pantai di kabupaten merauke belum berjalan optimal sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan. Upaya Pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke baru terbatas pada penanaman pohon bakau, pemerintah konsisten untuk tidak memberikan izin melakukan pertambangan pasir pantai, pembuatan tambak ikan dari lahan bekas galian dan sosialisasi yang diberikan kepada pelaku tambang. Hal penting yang harus dilakukan tetapi tidak dilaksanakan adalah belum ada tindakan tegas dari pemerintah Kabupaten Merauke untuk menertibkan pelaku tambang pasir ilegal. terkait pengendalian kerusakan Lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke ada kendala-kendala yang dihadapi terutama pada pemilik hak ulayat, pengusaha pengusaha nakal dan dari pelaku tambang yang kurang memupuk kesadaran akan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Alnoventio Bahtiar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2015 dengan judul : “Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir Di Kabupaten Sleman”.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan Izin usaha pertambangan sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman.
- 2) Apakah ada kendala atau hambatan di dalam pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman.

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman.
- 2) Untuk mengetahui kendala atau hambatan di dalam pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman.

c. Kesimpulan :

1. Pelaksanaan IUP sebagai upaya pengendalian lingkungan akibat kegiatan pertambangan pasir di kabupaten sleman sudah berjalan cukup baik. Pemilik IUP kegiatan pertambangan pasir selalu mendapat pengawasan dari BLH Kabupaten Sleman, Dinas SDAEM Kabupaten Sleman, dan DPUP-ESDM Provinsi DIY. Disamping itu pengawasan tersebut di dukung oleh adanya

kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan LSM. hanya saja proses pengurusan IUP kegiatan pertambangan pasir memerlukan waktu lama karena banyaknya SKPD yang memberikan rekomendasi dalam pengurusan IUP.

2. Ada beberapa kendala yang di hadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman yaitu Keterbatasan APBD dari Pemerintah daerah dan jumlah personil serta ahli yang terbatas dari Dinas SDAEM Kabupaten Sleman dan DPU-ESDM Provinsi dalam melakukan pengawasan kerusakan Lingkungan.

Penelitian penulis berbeda dengan ketiga tulisan (skripsi) tersebut diatas dalam hal fokus penelitiannya. Skripsi pertama memfokuskan pada Peran Kantor Pelayanan Perizinan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pertambangan Rakyat Di Kabupaten Sleman, skripsi kedua lebih membahas tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Pasir Pantai Di Kabupaten Merauke, skripsi ketiga lebih memfokuskan pada Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir Di Kabupaten Sleman, sedangkan rencana penelitian penulis lebih difokuskan pada Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Petambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.²

2. Pertambangan

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

3. Ilegal

Pengertian Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Pertambangan Ilegal adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dalam operasi atau kegiatan pertambangannya.³

4. Kerusakan Lingkungan Hidup

²Satjipto Raharjo, Op. Cit., hlm 15.

³<https://kbbi.web.id/ilegal> diakses pada tanggal 21/09/2017 pada pukul 21:33

Pengertian kerusakan lingkungan hidup dalam Pasal 1 butir 17 UUPPLH adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian : Penelitian hukum Empiris

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (Law In Action). Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber terkait penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian persoalan lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

b. Data Sekunder

Data diperoleh dengan mencari dan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang digunakan sebagai referensi penunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi :

⁴file:///C:/Users/Jonathan/Downloads/Documents/UU_NO_32_2009.PDF di akses pada tanggal 21/09/2017 pada pukul 21:36

1) Bahan Hukum Primer, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuan.
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- f) PP No. 23 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dalam PP No. 24 Tahun 2012 dan diubah pada perubahan kedua dalam PP No. 1 Tahun 2014 serta Perubahan Ketiga dalam PP 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan MINERBA.
- g) PP No. 25 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- h) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2015 Tata Cara Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Tengah
- i) Perda Kabupaten Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian persoalan lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan pendapat hukum dari Narasumber, yaitu Kepala Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kepala Seksi Penegakan Hukum dan Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur, Kepala UPT Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang digunakan, yaitu melalui :

- a. Studi Pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data-data dengan mempelajari regulasi yang terkait, buku-buku literatur dan berita dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang diambil dalam penelitian ini berada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden dalam penelitian ini :

1) Empat pelaku pertambangan emas di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dipilih dengan menggunakan metode *random sampling*, yaitu:

- a) Concong
- b) Aling Budiana
- c) Darius
- d) Yansen

2) Perwakilan warga (bukan pelaku pertambangan) di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dipilih dengan menggunakan metode *random sampling*, yaitu:

- a) Javo Fiveinarno
- b) Herwanto
- c) Odi
- d) Titi

b. Narasumber

Dalam Penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut :

- 1) Mohammad Ikhwan, Kepala Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 2) Agus Taswin, Kepala Seksi Penegakan Hukum dan Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 3) Tonny Sitohang, Kepala UPT Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Kotawaringin Timur.

6. Metode Analisis

Data yang diperoleh di analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.⁵

⁵Bambang, Sugono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.10.